



Notulensi

Hasil Evaluasi dari Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia

Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Gedung Mina Bahari III – KKP

Rabu, 26 Februari 2020

Pembukaan Agenda oleh Direktur Usaha dan Investasi (Dr Catur Sarwanto, S.Pt.,M.Si)

- Pembukaan agenda dan mengarahkan focus terhadap hasil evaluasi yang dilakukan APRI terhadap miniplant yang sudah diaudit sebanyak 243 miniplant.
- Dari Dirjen PDSPKP (Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan) memberi apresiasi untuk APRI, karena sudah berinisiatif melakukan audit dan membina miniplant. Semoga kerjasama ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk menunjang ekspor, karna ini merupakan himbauan dari Bapak Presiden juga untuk meningkatkan ekspor.

Persentasi Dr Hawis Madduppa (Eksekutif Direktur APRI)

- Menjelaskan tentang bagaimana perkembangan yang sudah dilaksanakan APRI dari 2019 sampai Februari 2020.
- Kami Informasikan tahun 2020 anggota APRI menjadi 17 anggota dengan masuknya FOTS (First On Time Seafood)
- Focus kami pertama adalah sistem ketelusuran, kontrol dokumen ini sebagai *tools* sebagai penjamin sistem ketelusuran tersebut kami harapkan dimiliki pemerintah juga karena pihak industri akan bisa menjalankan ini dengan sistem yang ada, yang kedua melihat stock assessment kita melakukan sistem pendataan dilanding site yang penting untuk melihat stock perikanan rajungan untuk melakukan evaluasi, ke tiga pengelolaan bersama dengan berbagai partnership salah satunya SFP, kita focus di 3 lokasi dari 8 site APRI (Pamekasan, Pamandati, dan Rembang) dan dengan EDF dan Starling di Lampung dan Jawa barat semoga dengan bersama mitra ini bisa mencakup wilayah yang lebih luas, ke empat melaksanakan sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan, dan ke lima adalah kepatuhan salah satunya dengan control dokumen.
- Adanya penurunan stock perikanan rajungan itulah kenapa penting adanya pengelolaan rajungan.
- Yang APRI audit adalah miniplant yang memiliki bangunan sendiri, tidak pengupasan dirumah.
- Control dokumen adalah perangkat untuk melihat kepatuhan

- Audit ini di jalan langsung ke miniplant dokumen rantai pasok akan kita dapatkan disana dari pabrik, stasiun perebusan, dan pengepul.
- Yang kita liat pada audit ini adalah informasi pencatatan dari pihak-pihak terkait.



Audit category

Rate	Value Range	Number of MP
A	≥ 70	15
B	50 – 69.9	35
C	30 – 49.9	91
D	< 30	103

- Ini nilai sistem pencatatan yang didapat dari audit miniplant. Kita tidak mencatat dari kualitas
- Ada tiga usulan yang diinginkan didiskusikan 1. Pertama usulan sertifikat, Tanda tangan tangan dan isi sertifikat 2. Lama akan dilakukan audit kembali 3. Penilaian dari katagori dari audit..

Pak gofar (NFI Crab Council)

- Indoensia adalah negara paling maju untuk pemasok rajungan karena hanya Indonesia yang memiliki control dokumen.
- Harus ada perbaikan terus agar kedepan bisa lebih baik.
- Harus adanya kerjasama disemua pihak

Bapak Catur

- Bila miniplant yang sudah CPIB dan SKP seharusnya compliance lebih tinggi nilainya, kami butuh keterangan lebih detail dari hubungan pencatatan dengan ketelusuran
- Dengan adanya audit ini apakah ada miniplant prioritas masuk ke UPI?
Justru itu pak yg kita usahakan, miniplant mana yang bagus. Dengan ada control dokumen ini sebagai rekomendasi untuk miniplant yang cocok sebagai bahanbaku harapanya seperti itu (Pak Hawis)

Esti Budiayah (PDS)

- Tidak semua pelaku usaha rajungan masuk anggota APRI, apabila nanti ada asosiasi lain itu sah-sah saja, sehingga jika sertifikat di keluarkan atas nama pemerintah disini saya perlu diskusi lagi karena ini akan jadi ke eksklusifitas asosiasi dalam manajemen sumberdaya khususnya rajungan. menurut hemat kami belum bisa memberi pandangan lebih klo misalnya Dirjen harus tanda tangan di sini. Harus ada Menteri yang menugaskan atau perturan Menteri terlebih dahulu. Karena apabila ada nama Dirjen di sebuah sertifikat mau tidak mau dia harus bertanggung jawab pada isinya.
- Harus justifikasi lebih untuk menaruh nama pemerintah di sertifikat.

Ibu Deny

- Untuk penerbitan ijin yang baru sehingga bila kami tidak ada landasan hukumnya baik itu suatu peraturan atau keputusan itu sulit disini suatu ijin itu kita harus mendapatkan ijin dari PERMENKO.
- IMPRES 7 tahun 2019
- Untuk kepentingan saat ini tolong jngn menggunakan lambang dan Dirjen dulu.

Ibu Lia Sugihartini (PBM)

- Apakah tidak lebih baik klo sertifikat dari APRI sendiri ,apakah cukup untuk compliance keinginan dari amerika karena ini adalah sistem yang dibawa oleh asosiasi karena KKP sudah terlibat dalam SC penilai dari hasil audit tersebut.
- Untuk masa berlaku untuk SKP 2 tahun. Itu bisa dilihat dari konsistensi dari pengusaha dan sarana-prasarana apa ada peberubah.
- Saran dari kami walau ini hanya sistem ketelusuran akankah baiknya penilai untuk safety di pertimbangan
- Kami minta data MP yang belum punya SKP karena kita bisa melakukan pembinaan.
- Untuk Gradeing kita harus melihat nilainya dulu.

Pak Didit (Dit.PP_PPI)

- Untuk 3 pertanyaan kita belum bisa menjawab

Pak Agus

- Terkait dengan dokumen rajungan tidak didaratkan dipelabuhan perikanan tetapi langsung di titik peregusan atau pengepul. Kami harapkan bisa saling berkoordinasi untuk masalah data pendaratan.

Pak Joko

- Ikan yang didaratkan untuk di ekspor harus ada lembar keluar dan lembar turunan.

Ash shaf As (BKIPM)

- Kami belum bisa memberikan saran untuk harapan pak Hawis, tetapi kami sudah ada peraturan untuk jadi rujukan yaitu: peraturan Menteri no 52 tahun 2018 terkait CPIB di supplier masa berlaku untuk 4 tahun tetapi dilakukan ferifikasi 1 tahun sekali dengan pertimbangan mutu dan keamanannya. Yg kedua untuk tracebilty Peraturan Kepala Badan KIPM No 170 tahun 2019 terkait tracebilty unit pengolahan ikan. Masalah gradeing Peraturan Menteri no 51 tahun 2019 tentang HACCAP dan peraturan Menteri no 52 tahun 2018 ada tiga katagori Sangat Baik, Baik, Cukup.

Pandapotan S (PSDKP)

- Kami bisa mendukung dari kelestarian dan ketelusuran yang kami hanya butuhkan adalah peraturannya.
- Stakeholder di rantai supplyer ini harus diperjelas agar kami bisa membantu dalam pengawasan.

Ibu Dessy (SFP)

- Peraturan dari Amerika bahwa setiap perusahaan disana harus membeli dari produk-produk yang legal. Makannya kita membantu APRI dengan control dokumen ini untuk memverifikasi dari supplier untuk Amerika.
- Control dokumen ini masih baseline makanya belum ada sanksi untuk yang tidak menuruti ini.
- Control dokumen juga masuk ke proses harvest strategy.

Rumiyanti (PDS)

- Untuk pengeluaran sertifikat silakan tetapi untuk logo dari KKP dan Direjen tolong jangan dulu tetapi bila ingin di tingkat untuk tingkat nasional mari kita regulasi bersama.

Pak Hawis

- Harus duduk bersama untuk membicarakan dan mempermudah proses yang di butuhkan.
- APRI sepakat karena memang harus berbadan hukum untuk menyusun dan tindak lanjutnya, kami memohon menyusun regulasi bersama dan dibimbing untuk ke depannya.

Rapat dihadiri

NO	Nama	Instanasi
1	Hawis Maddupa	APRI
2	Dr Catur Sarwanto	PBM
3	Lia Sugihartini	PBM
4	Esti Budiyasti	PDS
5	Dessy Anggraeni	SFP
6	Aburizhal	APRI
7	Toufan Phardana	APRI
8	Susi Awaliyah	APRI
9	Kurnia Supratika	Standardisasi
10	Vaya Fadya Lovista	Standardisasi
11	Yopi Nurdiansyah	Standardisasi
12	Arie Wahyu	Standardisasi
13	Agus N Awar	Dit PP
14	Joko S	Dit PP
15	Imam Taudik	BKIPM
16	Ash Shaf As	BKIPM
17	Sigit P	PSDKP
18	Pandapotan S	PSDKP
19	Sigit W	PSDKP
20	Rino F	Standardisasi
21	Didit E.S	Dit. PP_PPI
22	A.Ghofar	UNDIP_NFI
23	Rr Deny	
24	Dwi Yulianti	Diversifikasi
25	W. Andre	ISMK
26	Tiri Oktavia	Ta
27	Dian Agatya	IMB
28	Muhadi	PDS
29	Rumiyanti	PDS
30	M. Kadavi	PDS

Lampiran

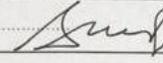
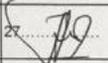
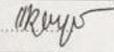
DAFTAR HADIR RAPAT

Jakarta, 26 Februari 2020

No.	Nama	Golongan	Instansi	Tanda Tangan
1	Hawis Madduppa		APRI	1.
2	Catur W	IV	PBM	2.
3	Lia Sugihartini	IV	PBM	3.
4	Esti Budiyah	IV	PDS	4.
5	Decoy Angaraeni		STP	5.
6	Aurizhal		APRI	6.
7	TOUFAN PHARDANA		APRI	7.
8	Susi Awalyah		APRI	8.
9	Kurnia Supratka	IV	Standardisasi	9.
10	Vaya Fadya Louisa	III	Standardisasi	10.
11	Yopi NURDIANSYAH	III	Standardisasi	11.
12	Ario Wahyu		std	12.
13	Arjo N Awar	III	Dit PP	13.
14	Joko, S	IV	Dit PP.	14.
15	Iman Taufik	III	BKIPM	15.
16	Ath Shyq Ar.	III	BKIPM	16.
17	Sigit P.	II	PSOP	17.
18	Pandapetran, S	IV	PSOLEP	18.
19	Sigit W	III	PSOP	19.
20	Rino, F	-	Standardisasi	20.

DAFTAR HADIR RAPAT

Jakarta, 26 Februari 2020

No.	Nama	Golongan	Instansi	Tanda Tangan
21	Didit E.S	IV	DT.PP-PPI	21..... 
22	A. Sufar	IV	UNSDP-NFI	22..... 
23	R. Denny H	III	Rehmi Pw	23..... 
24	Rur Juhati	IV	Diversifikasi	24..... 
25	W. Andra	III	ISMK	25..... 
26	Tri Oktavia	-	TU	26..... 
27	Dian Agatya	IV	IMB	27..... 
28	Muhadi	-	PDS	28..... 
29	Pumiyani	II	PDS	29..... 
30	M. Kadavi	-	PDS	30..... 